



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.17, No.1, Juni 2020

PERANG DAN DAMAI: SITUASI POLITIK DI ERA KETIDAKPASTIAN

- Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran
Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik
- Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War
- Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan
- Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika
Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan
- Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara
1989-2018
- Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia
di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional
- Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama
Ekonomi Subregional

REVIEW BUKU

- Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru
Kekuasaan dalam Politik Global

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 17	No. 1	Hlm. 1-158	Jakarta, Juni 2020	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	------------	-----------------------	-------------------

**Jurnal
Penelitian Politik**



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambatan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Prof. Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Siswanto (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Kurniawati Hastuti Dewi, M.A (*Ahli Gender dan Politik*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti (*Ahli Kajian Politik Internasional dan Keamanan*)
Prof. Dr. Tirta Mursitama (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Dr. Alfitra Salam (*Ahli Kajian Pemilu dan Demokrasi*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Dr. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Hayati Nufus, S.Hum., LL.M

Dewan Redaksi

Dr. Sri Nuryanti (*Ahli Kajian Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Dhurorudin Mashad (*Ahli Kajian Islam dan Timur Tengah*)
M. Nurhasim, S. IP, M. Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Awani Irewati, M.A (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Sandy Nur Ikfal R, M.Si(Han) (*Ahli Kajian Hubungan Internasional dan Perbatasan*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Esty Ekawati, M.IP.
Tri Rainny Syafarani, S.Sos, M.A., M.SE
Sutan Sorik, S.H.
Putri Ariza Kristimanta, M.Si.(Han)

**Layouter
Produksi dan Sirkulasi
Alamat Redaksi**

Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi
Adiyatnika, S.Kom
Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, E-mail: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476
Terakreditasi Kemeristek Dikti Nomor 10/E/KPT/2019

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i–ii
Catatan Redaksi	iii–iv
Artikel	
• Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik <i>Alfin Febrian Basundoro</i>	1–16
• Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War <i>M. Hamdan Basyar</i>	17–30
• Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan <i>Petrus Kanisius Siga Tage</i>	31–58
• Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di Tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan <i>M. Bahtiar Fajri</i>	59–78
• Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018 <i>Putri Ariza Kristimanta</i>	79–102
• Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional <i>Khanisa dan Lidya Christin Sinaga</i>	103–116
• Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional <i>Indriana Kartini, Awani Irewati, Agus R. Rahman, Tri Nuke Pudjiastuti, CPF Luhulima, Rosita Dewi, Sandy Nur Ikfal Raharjo, Hayati Nufus</i>	117–140
Review Buku	
• Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global <i>Defbry Margiansyah</i>	141–156
Tentang Penulis	157–158

CATATAN REDAKSI

Tahun 2020 dibuka dengan kekhawatiran akan pecahnya perang dunia ketiga akibat ketegangan politik global yang kian memanas. Serangan udara Amerika Serikat yang menewaskan Mayor Jenderal Iran Qassem Soleimani memperburuk ketegangan politik di Timur Tengah. Ketegangan di wilayah ini memiliki dampak yang lebih luas dan berpotensi menjadi ancaman bagi pasokan minyak global mengingat negara produsen minyak dunia berada di wilayah konflik ini.

Di sisi lain, meningkatnya ketegangan politik global juga disebabkan oleh persaingan dua kekuatan besar, yaitu Amerika dan Tiongkok. Perang dagang di antara dua negara ini berdampak pada perekonomian dunia. Selain itu, unjuk kekuatan militer kedua negara di wilayah Laut China Selatan juga menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan Asia tenggara. Persaingan antara Amerika dan Tiongkok ini semakin meningkatkan ketidakpastian politik global. Latar belakang kondisi politik internasional di atas mendorong redaksi untuk mengangkat judul “Perang dan Damai: Situasi Politik di Era Ketidakpastian” sebagai tema dalam terbitan *Jurnal Penelitian Politik* Volume 17, No. 1 Tahun 2020. Edisi kali ini menyajikan delapan tulisan yang terdiri dari tujuh artikel ilmiah dan satu naskah review buku.

Artikel pertama berjudul “**Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi – Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah: Sebuah Analisis Geopolitik**” mengulas tentang dinamika permainan kekuatan di antara dua aktor kunci dalam konflik di Timur Tengah, yaitu Arab Saudi dan Iran. Dalam memenuhi kepentingannya, kedua negara terlibat dalam perang proksi yang juga melibatkan negara-negara sekutu masing-masing. Dalam tulisan ini Alfin Febrian Basundoro menganalisis strategi yang dilakukan oleh Arab Saudi dan Iran dalam turbulensi yang terjadi di kawasan tersebut.

Artikel kedua yang ditulis oleh M. Hamdan Basyar berjudul “**Etika Perang dalam Islam dan Teori Just War**”. Tulisan ini memaparkan tahapan-tahapan dan etika perang dalam ajaran Islam. Selain itu, tulisan ini juga menyandingkan pembahasan etika perang dalam Islam dengan teori *just war* untuk lebih memahami makna jihad dan aturan-aturan dalam Islam terkait dengan perang. Melalui analisisnya penulis menemukan bahwa gagasan diskriminasi kombatan dan non-kombatan dalam Islam tidak setara dengan prinsip modern kekebalan non-kombatan.

Dalam artikel ketiga yang berjudul “**Politik Perang dan Perampasan Anggaran Sektor Kesehatan**” dibahas mengenai politik kebijakan anggaran kesehatan di era ketidakpastian. Pertus Kanisius Siga Tage melalui tulisannya mengungkapkan bahwa dalam situasi yang semakin rumit di era ketidakpastian, kebijakan terkait anggaran di beberapa negara justru mengabaikan sektor pembiayaan kesehatan dan lebih fokus pada sektor militer dan perang. Politisasi anggaran kesehatan ini perlu dianggap sebagai langkah keliru yang bisa membahayakan peradaban manusia.

Sementara itu, artikel keempat yang ditulis oleh M. Bahtiar Fajri menganalisis tentang strategi pertahanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika sengketa dan konflik di Laut China Selatan. Artikel berjudul “**Strategi Pertahanan Maritim Indonesia di tengah Dinamika Perang Hibrida Kawasan Laut China Selatan**” menunjukkan bahwa untuk menghadapi perang hibrida di kawasan Laut China Selatan, Indonesia perlu menyusun dan memperkuat strategi pertahanan maritimnya.

Selain ancaman perang antarnegara, konflik pada level domestik juga turut menjadi ancaman bagi stabilitas di kawasan. Dalam tulisan berjudul “**Tren dan Pemicu Kekerasan Terorganisasi di Asia Tenggara 1989-2018**”

Putri Ariza Kristimanta mengelaborasi tren kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara pada rentang waktu 1989-2018. Tulisan ini memaparkan bahwa dalam rentang waktu tersebut jumlah konflik berbasis negara sedikit meningkat, sedangkan konflik non-negara dan kekerasan sepihak justru sedikit menurun. Selain itu, penulis juga mengelaborasi pemicu kekerasan terorganisasi di Asia Tenggara dengan menggunakan Myanmar sebagai contoh.

Di tengah ketidakpastiaan politik global, Indonesia bercita-cita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Demi mewujudkan cita-cita tersebut, Indonesia perlu memastikan adanya lingkungan strategis yang damai dan stabil. Untuk itu, pembangunan lingkungan yang kondusif serta sinkronisasi antara visi Poros Maritim Dunia dan skema pembangunan maritim di tingkat ASEAN perlu diupayakan. Upaya Indonesia tersebut dipaparkan secara komprehensif oleh Khanisa dan Lidya C. Sinaga dalam artikel berjudul **“Menakar Keberlanjutan Visi Poros Maritim Dunia di Tengah Agenda Pembangunan Maritim Regional”**.

Sinkronisasi tidak hanya diperlukan di antara Indonesia dengan ASEAN. Untuk mendukung pembangunan di wilayah ini, perlu sinergi di antara ASEAN dengan kerja sama ekonomi subregional yang ada di kawasan ini, terutama dalam mendorong pembangunan konektivitas fisik, kelembagaan, dan antarmasyarakat demi mendukung implementasi Komunitas ASEAN yang damai dan sejahtera. Dalam artikel ketujuh yang berjudul **“Penguatan Konektivitas Lintas Batas dalam Kerja Sama Ekonomi Subregional”**, Indriana Kartini dan tim penulis menganalisis strategi pemanfaatan sinergi antara kerja sama ekonomi subregional dengan ASEAN untuk pembangunan konektivitas Indonesia, terutama di wilayah perbatasan.

Selain tujuh artikel di atas, penerbitan kali ini juga memuat review buku yang ditulis oleh Defbry Margiansyah dengan judul **“Inovasi dan Ketidakpastian: Menuju Perspektif Baru Kekuasaan dalam Politik Global”**. Ketidakpastian seringkali dilihat sebagai komponen difusi kekuasaan dalam

studi hubungan internasional. Buku karya Peter J. Katzenstein dan Lucia A. Seybert yang berjudul *Protean Power: Exploring the Uncertain and Unexpected in World Politics* melengkapi perspektif kekuasaan tersebut dalam menjelaskan dinamika politik global kontemporer. Dalam review buku ini Defbry juga mengkritisi analisis konseptual yang telah dilakukan oleh Katzenstein dan Seybert dengan merekonstruksi deskripsi konsep yang lebih operatif dalam menjelaskan kompleksitas dinamika kekuasaan dalam politik global.

Pada akhirnya, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada segenap pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini, khususnya para penulis, mitra bestari, dewan redaksi, dan tim pengelola jurnal. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* edisi kali ini dapat memberikan manfaat dan memperkaya kajian mengenai dinamika keamanan dan politik internasional.

Selamat membaca.

Redaksi

MENAKAR KEBERLANJUTAN VISI POROS MARITIM DUNIA DI TENGAH AGENDA PEMBANGUNAN MARITIM REGIONAL

MEASURING CONTINUITY OF GLOBAL MARITIME FULCRUM VISION AMIDST REGIONAL MARITIME DEVELOPMENT AGENDA

Khanisa dan Lidya C Sinaga

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Jln. Jend. Gatot Subroto Kav. 10, Jakarta
E-mail: khanisa.krisman@gmail.com, lidya.bosua@gmail.com

Diterima: 28 April 2020; direvisi: 18 Mei 2020; disetujui: 26 Juni 2020

Abstract

Global Maritime Fulcrum marks the changing of developmental direction in Indonesia. This ambition is not only directed to build the country nationally, but also to make Indonesia as “the fulcrum” in the global scale. However, to realize such vision, Indonesia must strengthen the maritime environment within Southeast Asia, which geographically surrounds the country and strategically related to Indonesia through many ASEAN cooperation frameworks. Therefore, Indonesia must establish a conducive setting to ensure the continuity of the Global Maritime Fulcrum. This article further discusses the previous effort that has been done under President Joko Widodo’s first term (2014–2019) in regard of synchronizing the vision of the Global Maritime Fulcrum and maritime development scheme in ASEAN. Also, it will discuss how this vision will be positioned within the second term of his administration.

Keywords: ASEAN, global maritime fulcrum, Indonesia, Indo-Pacific, maritime

Abstrak

Poros Maritim Dunia merupakan visi yang menandai perubahan haluan pembangunan di Indonesia. Ambisi maritim ini bukan hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, melainkan juga untuk mencapai posisi sebagai sebuah “poros” dalam skala global. Namun, untuk mencapai hal tersebut Indonesia harus memastikan adanya penguatan maritim di lingkup regional Asia Tenggara yang secara geografis mengelilinginya dan secara strategis memiliki kaitan erat, terutama dalam kerangka kerja sama di ASEAN. Untuk itu, Indonesia harus memastikan terbentuknya sebuah lingkungan kondusif bagi keberlangsungan Poros Maritim Dunia itu sendiri. Artikel ini lebih jauh membahas usaha-usaha yang telah dilakukan pada lima tahun pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (2014–2019) untuk memastikan sinkronisasi antara visi Poros Maritim Dunia dan skema pembangunan maritim di ASEAN serta melihat bagaimana visi ini diposisikan dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo.

Kata kunci: ASEAN, Indonesia, Indo-Pasifik, maritim, poros maritim dunia

Pendahuluan

Pada termin pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, implementasi visi Poros Maritim Dunia merupakan hal yang tidak pernah lepas dari sorotan publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pilar-pilar visi Poros Maritim Dunia yang secara resmi diumumkan Presiden Joko Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar pada November 2014 menjadi panduan awal mengenai hal-hal yang akan dilakukan setidaknya dalam lima tahun ke depan. Pilar-pilar tersebut adalah pendalaman kembali budaya maritim, pengelolaan sumber daya maritim, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, penyelesaian konflik perbatasan laut melalui diplomasi maritim serta peningkatan pertahanan maritim. Tentunya dari kelima pilar ini dapat dilihat bahwa pembangunan wilayah maritim yang dicanangkan merupakan sebuah usaha holistik yang apabila dilakukan secara optimal tidak hanya akan berdampak secara nasional, tetapi juga regional dan internasional.

Oleh karena itu, penting untuk meletakkan visi ini dalam konteks lebih luas. Dalam hal ini, Asia Tenggara sebagai sebuah lingkup geografis dan strategis akan memengaruhi maupun dipengaruhi oleh visi tersebut. Pengukuran ini menjadi penting karena selain fakta geografis di mana wilayah Indonesia merupakan wilayah kepulauan terbesar di Asia Tenggara, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki posisi khusus dalam *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN). Bukan hanya berperan sebagai satu dari lima negara pendiri ASEAN, Indonesia melalui inisiatif-inisiatifnya juga kerap kali membentuk arah maupun isu strategis yang kemudian ditindaklanjuti di level regional.

Mengingat banyaknya isu maritim yang saling terpaut antara Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya, ambisi Indonesia untuk mengupayakan berbagai skema pembangunan maritim dalam Poros Maritim Dunia tentunya akan berjalan lebih lancar dengan adanya sinergi antara Indonesia dan ASEAN.

Ada dua pertanyaan mendasar yang dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu “bagaimana

upaya Indonesia untuk menciptakan sinergi antara visi Poros Maritim Dunia dan mekanisme pada tingkat regional?” dan “bagaimana prospek keberlanjutan visi ini pada termin kedua pemerintahan Joko Widodo dalam perspektif regional?” Tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. *Pertama*, menilik implementasi visi Poros Maritim Dunia yang telah dilakukan pada termin pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. *Kedua*, menelusuri sinergi agenda maritim nasional dan regional di ASEAN dan negara mitranya. *Ketiga*, melihat keberlanjutan visi Poros Maritim Dunia pada termin kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam hubungannya dengan dinamika perubahan di kawasan dan semakin mengemukanya narasi Indo-Pasifik sebagai tatanan regional baru. *Terakhir*, artikel ini ditutup dengan memberikan rekomendasi mengenai pentingnya penguatan sinergi arah kebijakan maritim antara Indonesia dan ASEAN untuk memastikan stabilitas di kawasan.

Implementasi Visi Poros Maritim Dunia (2014–2019)

Apabila dilihat ke belakang, keinginan untuk membangkitkan kembali semangat Indonesia sebagai negara maritim sudah terlihat sejak masa kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dalam mewujudkan visi “terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”, salah satu misi yang diselipkan adalah “mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional”.¹ Setelah terpilih secara resmi sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia, secara simbolis Joko Widodo menunjukkan perhatiannya pada bidang maritim dengan membawakan pidato kemenangannya di atas salah satu perahu pinisi di pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta.²

¹ KPU, “Visi-Misi Program Aksi Ir. H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014”, tidak ada tanggal, https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf, diakses pada 10 April 2010.

² BBC, “Pidato Kemenangan Jokowi di Sunda Kelapa”, 22 Juli 2014, <https://www.bbc.com/>

Mengawali masa pemerintahannya, dalam pidato kenegaraan pertamanya yang berjudul “Di Bawah Kehendak Rakyat dan Konstitusi”, Presiden Joko Widodo secara eksplisit menegaskan kembali keinginannya untuk menjadikan wilayah maritim sebagai salah satu fokus pembangunan. Dalam pidato tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan,

“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk.”³

Kata “memunggungi” yang digunakan Presiden Joko Widodo dalam potongan pidato tersebut mengindikasikan adanya pengabaian wilayah maritim Indonesia pada kepemimpinan-kepemimpinan sebelumnya sehingga Indonesia harus kembali kepada fitrahnya sebagai negara maritim. Walaupun sebenarnya sudah ada usaha-usaha dari beberapa pemerintahan sebelumnya, seperti “Deklarasi Bunaken” pada masa pemerintahan B.J. Habibie, pembentukan Departemen Eksplorasi Laut pada masa K.H. Abdurrahman Wahid, “Seruan Sunda Kelapa” pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri, dan program “Pendulum Nusantara” pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Akan tetapi, kebijakan-kebijakan tersebut mungkin tidak mendapatkan porsi implementasi yang berpengaruh besar bagi pembangunan maritim nasional.⁴

Melanjutkan komitmennya untuk berfokus pada pembangunan wilayah maritim, Presiden Joko Widodo menggunakan mimbar Konferensi

indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_presiden_jokowi, diakses pada 10 April 2010.

³ Republika, “Ini Isu Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko Widodo”, 20 Oktober 2014, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqaf1-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo>, diakses pada 10 April 2020.

⁴ Dewan Kelautan Indonesia, “Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru”, dalam Khanisa dan Faudzan Farhana (eds.), *Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2018): hlm. 3–4.

Tingkat Tinggi Asia Timur di Naypyidaw, Myanmar pada November 2014 untuk secara jelas mengumumkan Poros Maritim Dunia dengan pilar-pilarnya. Penggunaan mimbar KTT Asia Timur sendiri merupakan langkah strategis yang mengindikasikan besarnya dampak yang diharapkan dari implementasi visi ini. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo secara langsung mengatakan, “Bagi Indonesia, KTT Asia Timur berperan penting bagi keamanan, stabilitas, dan kemakmuran ekonomi di kawasan”.⁵

KTT Asia Timur sendiri merupakan sebuah forum prestisius yang digelar ASEAN bersama delapan mitra strategisnya, yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, India, Rusia, Australia, dan Selandia Baru. KTT tersebut adalah satu dari sedikit mimbar internasional yang mampu mendudukkan negara-negara yang memiliki pandangan berseberangan, seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, dalam satu forum. Terlebih pada 2014, KTT Asia Timur ini juga dihadiri oleh Presiden Amerika Barack Obama, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.⁶

Pengumuman yang dilakukan di Naypyidaw menimbulkan spekulasi mengenai bagaimana pengaruh visi Poros Maritim Dunia terhadap dinamika perimbangan kekuatan di kawasan, mengingat wilayah maritim Asia Tenggara, termasuk Indonesia yang berada di dalamnya, memiliki signifikansi geostrategi dan geoekonomi yang berpengaruh dalam kerangka internasional. Jelas beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, melihat visi Poros Maritim Dunia sebagai lahan kerja sama potensial. Dalam tulisannya, Vibhanshu

⁵ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Pidato Presiden RI Joko Widodo pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014”, 14 November 2014, <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>, diakses pada 10 April 2020.

⁶ Rendi A. Witular, “Jokowi Launches Maritime Doctrine to the World”, 13 November 2014, <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html>, diakses pada 12 April 2020.

Shekar dan Joseph Liow mengatakan bahwa visi ini, khususnya dalam pilar pertahanan maritim, dapat memperlebar jalan bagi Amerika Serikat untuk memperdalam hubungannya dengan Indonesia, mengingat kedua negara telah menandatangani skema kemitraan komprehensif pada tahun 2010.⁷ Sementara itu, bagi Tiongkok, seperti yang dituliskan Qiu Xinli, Poros Maritim Dunia merupakan sebuah visi yang memiliki hubungan erat dengan *Belt And Road Initiative* (BRI) sehingga sinergi antarkeduanya akan sangat menguntungkan kedua negara.⁸

Dalam konteks implementasi visi Poros Maritim Dunia di dalam negeri, pembentukan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Maritim mengawali pembuatan skema kebijakan nasional yang nantinya akan dikeluarkan. Didasari dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, kemenko ini bertugas “menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman”. Kementerian ini mengoordinasikan empat kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pariwisata.⁹

Kementerian ini juga bertanggung jawab atas pembuatan Kebijakan Kelautan Indonesia yang diharapkan menjadi cetak biru pembangunan maritim di Indonesia. Setelah proses yang cukup panjang untuk

mengumpulkan dan mendiskusikan dengan seluruh kementerian/lembaga, instansi, dan *stakeholders* yang memiliki kepentingan di sektor maritim, pada tahun 2017 Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) berhasil diresmikan menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017. Dokumen ini memperluas kelima pilar yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2014 menjadi tujuh pilar, yaitu (1) Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, (2) Pertahanan, Keamanan, Penegakan Hukum dan Keselamatan di Laut, (3) Tata Kelola dan Kelembagaan Laut, (4) Ekonomi dan Infrastruktur Kelautan dan Peningkatan Kesejahteraan, (5) Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut, (6) Budaya Bahari, dan (7) Diplomasi Maritim.¹⁰ Sebagai panduan teknisnya, Dokumen Nasional KKI juga dilengkapi dengan adanya Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia 2016-2019 yang program-programnya dikelompokkan dalam lima klaster, yaitu (1) Batas Maritim, Ruang Laut, dan Diplomasi Maritim, (2) Industri Maritim dan Konektivitas Laut, (3) Sumber Daya Alam dan Jasa Kelautan serta Pengelolaan Lingkungan Laut, (4) Pertahanan dan Keamanan Laut, dan (5) Budaya Bahari.¹¹

Cetak biru yang telah terbentuk merupakan tanggung jawab yang harus dilaksanakan secara menyeluruh, mengingat Indonesia sendiri telah lama “memungungi laut”, sehingga banyak ketertinggalan yang harus dikejar dalam memastikan tercapainya visi Poros Maritim Dunia. Pemaparan berikut akan memberikan penjabaran singkat mengenai dua dari beberapa sektor maritim yang banyak disoroti dalam implementasi visi Poros Maritim Dunia, yaitu pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) 115 dan pembangunan infrastruktur melalui pembangunan tol laut.

⁷ Vibhanshu Shekar dan Joseph Liow, “Indonesia as Maritime Power: Jokowi’s Vision, Strategies, and Obstacle Ahead”, 7 November 2014, <https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/>, diakses pada 13 April 2020.

⁸ Qiu Xinli, “Why BRI-GMF Cooperation Benefits China and Indonesia” *The Jakarta Post*, 23 Agustus 2013.

⁹ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman”, (tidak ada tanggal) <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/174381/Perpres%20Nomor%2010%20Tahun%202015.pdf>, diakses pada 13 April 2020.

¹⁰ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia”, (tidak ada tanggal), <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175145/lampiran%201%20perpres%2016%20th%202017.pdf>, diakses pada 13 April 2020.

¹¹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia...”,

Sebagai negara maritim yang seharusnya dapat memanfaatkan hasil laut yang melimpah, Indonesia kerap kali masih kesulitan untuk menangani pencurian ikan yang ada di perairannya. Keluarnya kebijakan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal yang diresmikan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal menjadi langkah awal yang menjanjikan. Perpres ini memberikan komando tertinggi pada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk kemudian bekerja sama dengan Wakil Kepala Staf TNI AL, Kepala Badan Keamanan Laut, Kepala Badan Pemelihara Keamanan-Kepolisian Negara RI serta Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum-Kejaksaan Agung RI.¹² Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dengan kebijakannya menenggelamkan kapal asing yang mencuri hasil laut Indonesia, diapresiasi banyak pihak dan menjadi sorotan dunia. Sampai akhir masa jabatannya, Menteri Susi Pudjiastuti berhasil melakukan 556 penenggelaman kapal, paling banyak berasal dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia.¹³

Adapun sektor maritim lain yang tertinggal cukup jauh adalah perihal kurang memadainya infrastruktur penyambung transportasi kelautan. Sebagai wilayah kepulauan, keberadaan jalur distribusi laut yang terjalin dengan baik menjadi sangat vital. Akan tetapi, masih terpusatnya sumber logistik di wilayah barat Indonesia menyebabkan mahal biaya pelayaran ke dan dari wilayah timur Indonesia karena pengantaran umumnya dilakukan satu arah di mana kapal harus berlayar kembali, namun minim muatan. Menindaklanjuti masalah

tersebut, salah satu program besar pemerintahan Joko Widodo adalah pembuatan jalur Tol Laut yang terkoneksi dengan area-area perekonomian atau Kawasan Ekonomi Khusus. Bentuk dari Tol Laut sendiri adalah pengoneksian 19 pelabuhan *feeder* atau pengumpan dan lima pelabuhan *hub* atau pengumpul yang lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.¹⁴ Dalam salah satu paparannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro mengharapkan skema pelabuhan *hub* dan *feeder* dimaksudkan untuk “meningkatkan frekuensi pengangkutan produksi dan penurunan biaya pengiriman dari wilayah timur ke sentra-sentra industri olahan yang berada di bagian barat Indonesia”.¹⁵ Dalam memenuhi targetnya untuk mengefektifkan penghantaran logistik hingga tahun 2019, memang terdapat peningkatan pada slot keterisian barang. Sebagaimana dipaparkan Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan, tingkat keterisian muatan berangkat adalah sebesar 74,8 persen dan muatan balik sebanyak 6,7 persen. Ketimpangan ini disinyalir berasal dari tidak adanya komoditas yang diangkut kembali.¹⁶

Mengenai implementasi Tol Laut, hasil Tim Kajian ASEAN P2P-LIPI tahun 2019 mengungkapkan adanya kesulitan menggerakkan konsentrasi logistik untuk mengarah pada pelabuhan *hub* baru yang ditentukan. Jalur pelayaran masih diarahkan ke dua pelabuhan besar di Pulau Jawa, yaitu Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Jawa Timur. Tidak mudah untuk begitu saja mengarahkan

¹² Kementerian Kelautan dan perikanan Republik Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)”, (tidak ada tanggal), https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PERPRES_NO_115_2015.pdf, diakses pada 15 April 2020.

¹³ Muhammad Idris, “Selama Jadi Menteri, Berapa Kapal yang ditenggelamkan Susi?”, 6 Januari 2020, <https://money.kompas.com/read/2020/01/06/160600226/selama-jadi-menteri-berapa-kapal-china-ditenggelamkan-susi>, diakses pada 15 April 2020.

¹⁴ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, “Pembangunan Tol Laut Libatkan 24 Pelabuhan”, 25 Mei 2015, <http://dephub.go.id/berita/baca/pembangunan-tol-laut-libatkan-24-pelabuhan/?cat=QmVyaXRhfA==>, diakses pada 15 April 2020.

¹⁵ Kementerian PPN/Bappenas, “Menteri Bambang: Mewujudkan Terciptanya Konektivitas Timur Barat Indonesia melalui Tol Laut”, 4 Mei 2017, <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-mewujudkan-terciptanya-konektivitas-timur-barat-indonesia-melalui-tol-laut/>, diakses pada 15 April 2020.

¹⁶ Trio Hamdani, “Lamat Tak terdengar, Apa Kabar Program Tol Laut Jokowi”, 12 Maret 2020, <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4936600/lamat-tak-terdengar-apa-kabar-program-tol-laut-jokowi>, diakses pada 15 April 2020.

jalur pelayaran ke Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara dan Pelabuhan Bitung di Sulawesi Utara yang sebenarnya sudah dirancang menjadi pelabuhan hub internasional untuk wilayah Indonesia Barat dan Timur.¹⁷

Sinergi Agenda Maritim Nasional dan Regional

Melihat pada banyaknya sektor yang harus dibangun dalam mewujudkan visi Poros Maritim Dunia, tentunya berbagai kerja sama dan lingkungan pendukung yang kondusif merupakan hal krusial. Dalam berbagai agenda kerja sama maritim telah digaungkan berbagai upaya untuk mencapai kesepahaman antarnegara maupun membuka kemungkinan investasi dari negara lainnya di bidang maritim. Bagian ini mengkaji usaha-usaha yang dilakukan Indonesia pada kancah regional sebagai usaha mendukung visi Poros Maritim Dunia.

Usaha yang dilakukan di tingkat ASEAN selanjutnya merupakan tindakan lanjutan dari pengumuman Poros Maritim Dunia untuk pertama kalinya di Naypyidaw tahun 2014. Pada KTT Asia Timur tahun berikutnya di Kuala Lumpur, Malaysia, Indonesia bersama Tiongkok, Selandia Baru, Australia, dan Amerika Serikat menjadi *co-sponsors* dari Pernyataan KTT Asia Timur mengenai Penguatan Kerja Sama Maritim Regional (*EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation*). Pernyataan yang kemudian disetujui oleh seluruh negara di forum tersebut mendeklarasikan pentingnya aksi nyata dalam lima sektor kerja sama, yaitu (1) penguatan kerja sama dalam pembangunan ekonomi maritim yang berkelanjutan; (2) promosi atas perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan; (3) penguatan kerja sama dalam menangani tantangan lintas batas; (4) peningkatan usaha untuk membangun konektivitas maritim; dan (5) promosi kerja sama antara institusi riset dalam isu maritim.¹⁸

¹⁷ Lihat: Lidya C. Sinaga, "Pembangunan Konektivitas Maritim dalam Skema Poros Maritim Dunia", dalam *Laporan Penelitian Tim Kajian ASEAN 2019 Poros Maritim Dunia dan Konektivitas Maritim di ASEAN*, (belum dipublikasi).

¹⁸ ASEAN, "EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, Kuala Lumpur 2015", 22

Pertanyaan yang dikeluarkan dalam KTT Asia Timur tahun 2014 ini merupakan pembuktian dari usaha Indonesia untuk menyelaraskan apa yang ada dalam kebijakan nasionalnya dengan arah pembangunan regional, salah satunya ASEAN *Connectivity*. Hal ini secara langsung disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya: "Kerja sama maritim sangat strategis, karena sejalan dengan prakarsa Indonesia mengenai Poros Maritim Dunia, memiliki dampak langsung terhadap stabilitas, keamanan, serta kemakmuran di kawasan."

Seperti yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, KTT Asia Timur merupakan sebuah forum prestisius di mana ASEAN mampu mendudukkan delapan negara mitra terdekat. Proses penyelarasan sudut pandang melalui KTT akan sangat efektif dan efisien karena bukan hanya dapat menjangkau wilayah Asia Tenggara dalam cakupan geografis, namun juga negara-negara yang terkait secara strategis. Menurut Nick Bisley, KTT Asia Timur memiliki tiga perbedaan yang membuatnya unggul dari inisiatif regional lainnya, yaitu cakupan isu yang lebih luas, proses yang dihadiri pimpinan tertinggi antarnegara, dan keanggotaannya mencakup negara-negara kunci yang memainkan peran penting di kancah Asia Timur. Ketiga keunggulan ini menurut Bisley merupakan potensi besar, namun ASEAN sendiri perlu menekankan kembali makna dari sentralitasnya di dalam KTT tersebut, mengingat adanya kekuatan-kekuatan besar di dalamnya.¹⁹ Dalam menyikapi hal ini maka Indonesia harus berusaha lebih keras dalam menjaga kebersatuan dan sentralitas dalam ASEAN.

Selanjutnya, dalam konteks penyelarasan visi nasional dengan agenda regional, Indonesia juga berkesempatan memimpin pertemuan *ASEAN Maritime Forum* (AMF) ke-7 serta *Expanded ASEAN Maritime Forum* (EAMF)

November 2015, <https://www.asean.org/storage/images/2015/November/10th-EAS-Outcome/EAS%20Statement%20on%20Enhancing%20Regional%20Maritime%20Cooperation%20-%20FINAL%202022%20November%202015.pdf>, diakses pada 17 April 2020.

¹⁹ Nick Bisley, "The East Asia Summit and ASEAN: Potential and Problems," *Contemporary Southeast Asia* 39, no. 2 (Agustus 2017): 265–272, hlm. 266.

ke-5 pada Desember 2017.²⁰ Pada pertemuan tahun 2017 tersebut, terdapat beberapa isu spesifik yang dibicarakan, yaitu kerja sama bidang keselamatan dan keamanan di laut, IUU Fishing, perdagangan manusia, kejahatan perikanan, dan perlindungan lingkungan hidup. AMF sendiri adalah tindak lanjut dari komitmen ASEAN untuk menangani isu-isu maritim, seperti tertera dalam Deklarasi ASEAN Concord II tahun 2003. Dalam lingkup ASEAN sebelum terbentuknya AMF, pada tahun 2010 di Surabaya, Indonesia isu-isu maritim dibahas terpisah tergantung pada bidang kerja samanya, misalnya transportasi, kejahatan transnasional, lingkungan hidup maupun kebijakan perundangan di laut. Pada tahun ketiga berjalannya forum ini, AMF kemudian berkembang menjadi EAMF yang juga melibatkan negara-negara mitra terdekat yang tergabung dalam EAS. Sayangnya, menurut Shafiah Muhibat, AMF dan EAMF masih diragukan untuk dapat berlangsung di masa depan melihat beberapa inkonsistensi forum ini, terutama terkait dengan status pelaksanaan, permasalahan komitmen, dan keseimbangan kepentingan forum ini di mata semua negara ASEAN.²¹

Selain dalam kerangka regional yang membicarakan isu maritim secara umum, Indonesia juga terus berperan membentuk persepsi dalam ranah yang lebih spesifik, misalnya pada isu pemberantasan IUU Fishing. Namun, tugas tersebut tidak mudah dilakukan. Kebijakan penenggelaman kapal yang terlibat IUU Fishing ini menuai protes negara tetangga, mengingat seperti disebut sebelumnya, asal kapal yang ditenggelamkan paling banyak adalah dari Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Kesulitan lain yang dihadapi Indonesia juga digambarkan oleh Risha Jilian Chaniago dalam proses pengeluaran Pernyataan ASEAN Regional

Forum (ARF) mengenai Kerja Sama untuk Mencegah, Menghalangi, dan Memberantas IUU Fishing (*ARF Statement on Cooperation to Prevent, Deter and Eliminate IUU Fishing*) yang seharusnya dinyatakan, pada Pertemuan Tingkat Menteri ARF ke-23 di Vientiane, Laos, pada tahun 2016 karena terdapat perbedaan pandangan mengenai konflik perikanan di wilayah maritim yang tumpang tindih dengan IUU Fishing itu sendiri.²² Walaupun demikian, pernyataan tersebut akhirnya tetap dapat dikeluarkan dalam Pertemuan Tingkat Menteri ARF berikutnya di Manila, Filipina pada tahun 2017.²³ Selain melalui ARF, Indonesia juga menggunakan mimbar *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC). Dalam pertemuan SEAFDAC Council ke-51 yang diadakan di Surabaya, Indonesia menjadi *lead country* dari ASEAN dalam hal pemberantasan IUU Fishing dengan mengajukan usulan untuk “melanjutkan pengembangan dan peningkatan kapasitas bagi negara anggota melalui pelatihan dan bantuan teknis”.²⁴

Isu spesifik lainnya yang perlu diselaraskan dengan skema regional adalah mengenai pembangunan infrastruktur konektivitas maritim dalam visi Poros Maritim Dunia dan hubungannya dengan skema pembangunan ASEAN *Connectivity*. Besarnya biaya yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur konektivitas maritim membuat Indonesia harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk menjaring kerja sama dengan mitra-mitranya.

²² Risha Jilian Chaniago, “Ancaman Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Indonesia,” *Majalah Masyarakat ASEAN*, Desember 2016, hlm 8–9.

²³ ASEAN, “Asean Regional Forum Statement on Cooperation to Prevent, Deter, Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing”, (tidak ada tanggal), <http://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/01/ARF-Statement-on-Cooperation-to-Prevent-Deter-and-Eliminate-Illegal-Unreported-and-Unregulated-Fishing-Manila-the-Philippines-7-August-2017.pdf>, diakses pada 17 April 2020.

²⁴ Juli Etha Ramaida Manalu, “Pelaku Perikanan Asia Tenggara Berkumpul, Keberlanjutan Jadi Fokus”, 20 Maret 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190320/99/902196/pelaku-perikanan-asia-tenggara-berkumpul-keberlanjutan-jadi-fokus>, diakses pada 17 April 2020.

²⁰ Teddy Tri Setio Berty, “Indonesia Pimpin Penguatan Kerja Sama Maritim di Kawasan ASEAN”, 6 Desember 2017, <https://www.liputan6.com/global/read/3185957/indonesia-pimpin-penguatan-kerja-sama-maritim-di-kawasan-asean>, diakses pada 17 April 2020.

²¹ Shafiah F Muhibat, “AMF and EAMF: An Uncertain Future?”, 2 Juni 2017 <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/06/CO17111.pdf>, diakses pada 17 April 2020.

Menurut Siwage Dharma Negara dan Sanchita Basu Das, Indonesia dapat memanfaatkan skema pembangunan maritim yang ada di dalam *Master Plan on ASEAN Connectivity* (MPAC) karena skema pembangunan maritim di MPAC sendiri sebenarnya sudah bersifat komplementer bagi pembangunan infrastruktur maritim pada visi Poros Maritim Dunia dengan 14 dari 47 *designated ports* dalam skema MPAC berada di Indonesia.²⁵ Melanjutkan pemaparan mereka mengenai koneksi visi Poros Maritim Dunia dan MPAC, Negara dan Bas mengatakan bahwa Indonesia dapat diuntungkan dari mekanisme penjalinan hubungan yang sudah dilakukan ASEAN terhadap *stakeholders* yang sekiranya dapat berinvestasi pada program pembangunan infrastruktur. ASEAN juga telah berkolaborasi dengan *Asian Development Bank* dalam membuat *ASEAN Infrastructure Fund*.²⁶ Hubungan yang erat antara visi Poros Maritim Dunia dan MPAC secara spesifik disebutkan Presiden Joko Widodo ketika memaparkan visi Poros Maritim Dunia di Naypyidaw pada tahun 2014 silam. Presiden Joko Widodo mengatakan,

“Kami mendorong negara-negara mitra ASEAN di EAS untuk mendukung dan terlibat aktif dalam mewujudkan ASEAN *Masterplan on Connectivity*, khususnya konektivitas dan infrastruktur maritim”.²⁷

Transformasi Visi Poros Maritim Dunia dan Dinamika Global

Setelah lima tahun berjalan, visi Poros Maritim Dunia belum banyak menunjukkan keberhasilan. Walaupun harus diakui, visi ini membawa perkembangan positif pada beberapa sektor maritim, misalnya kesadaran akan hak pengelolaan sumber daya laut dengan memerangi pelaku *IUU Fishing* maupun

pentingnya pembangunan infrastruktur maritim untuk memastikan pemerataan logistik. Namun, masih banyak kritik dan masukan positif untuk lebih baik lagi mewujudkan visi tersebut.

Dalam kajian yang dilakukan penulis bersama Tim Kajian ASEAN Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2019, disimpulkan bahwa terdapat beberapa masalah yang masih dihadapi dalam meningkatkan konektivitas maritim sebagaimana termaktub dalam visi Poros Maritim Dunia. *Pertama*, adanya rentang waktu yang cukup lama (tiga tahun) dari penancangan visi Poros Maritim Dunia hingga lahirnya *grand design* dalam bentuk Kebijakan Kelautan Indonesia. *Kedua*, akibatnya, terdapat ketidakterhubungan antara visi Poros Maritim Dunia di dokumen *grand design* dan implementasi pembangunan infrastruktur untuk mendukung program ini. *Ketiga*, tidak optimalnya pelabuhan hub internasional dalam fungsinya sebagai gerbang menuju konektivitas global akibat belum terbangunnya hub ekonomi. *Keempat*, pembangunan infrastruktur Tol Laut belum dapat memperlihatkan dampak regional maupun internasionalnya. *Kelima*, adanya persoalan pendanaan infrastruktur yang menyertai implementasi konektivitas ASEAN. *Keenam*, belum jelasnya visi yang menggarisbawahi pentingnya konektivitas holistik yang melihat hubungan antara skema nasional, regional dan global. Hal ini mengakibatkan belum adanya strategi terpadu yang dirancang untuk memanfaatkan situasi geopolitik dan geoeкономи yang kini terjadi.

Kajian lain yang dilakukan Yety Rochwulaningsih menyatakan bahwa kurang berhasilnya visi Poros Maritim Dunia disebabkan oleh tiga hal, yaitu perang dagang antara AS dan Tiongkok yang memengaruhi kelancaran investasi di Indonesia; belum maksimalnya penggalan potensi industri perikanan dan kapasitas pembangunan; dan pengembangan industri perkapalan modern yang menurun.²⁸ Sementara itu, suara yang lebih

²⁵ Siwage Dharma Negara dan Sanchita Basu Das, “Challenges for Indonesia to Achieve its Maritime Connectivity Plan and Leverage on Regional Initiatives,” *ISEAS Yusof Ishak Institute Perspective* 2017, no. 3, (10 Januari 2017): hlm. 4.

²⁶ Siwage Dharma Negara dan Sanchita Basu Das, “Challenges for Indonesia to achieve...”, hlm. 6.

²⁷ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.

²⁸ Yety Rochwulaningsih, “Jokowi Perlu Strategi Baru untuk Mencapai Ambisi Poros Maritim Dunia. Ini Caranya”, 8 November 2019, <https://theconversation.com/jokowi-perlu-strategi-baru-untuk-mencapai-ambisi-poros-maritim-dunia-ini-caranya-126432>, diakses pada 19 April 2020.

kritis diungkapkan oleh Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan yang mengatakan visi Poros Maritim Dunia lebih menitikberatkan pada investasi dan bukan pembangunan masyarakat maritim itu sendiri. Hal ini menurut mereka dapat terlihat dari tersingkirnya masyarakat pesisir dari program-program visi ini.²⁹

Mengenai keberlanjutan visi Poros Maritim Dunia pada termin kedua Pemerintahan Joko Widodo, masih menjadi hal yang patut diamati lebih jauh. Pada termin kedua, penyebutan visi ini oleh Presiden Joko Widodo tidak memiliki frekuensi yang sama seperti termin pertama. Isu maritim tidak lagi terlihat dalam visi-misi kampanye, pidato kemenangan, maupun pidato pertamanya sebagai Presiden Republik Indonesia periode kedua 2019–2024. Akan tetapi, dalam pengamatan Riza Damanik, sebenarnya visi Poros Maritim Dunia pada termin kedua memasuki masa “memanen”, yaitu saat program-program yang dilakukan pada termin sebelumnya diharapkan mulai menunjukkan hasil yang positif. Damanik menambahkan penting untuk memastikan tiga prioritas, yaitu memperkuat kultur inovasi, memperkuat perikanan budi daya serta memastikan diplomasi maritim yang strategis.³⁰ Hal ini sejalan dengan suara dari pemerintah yang mengatakan bahwa visi Poros Maritim Dunia tetap akan dijalankan pada termin kedua dengan fokus melakukan pemantapan serta optimalisasi pada hal-hal yang telah dibangun.³¹

Terlepas dari pelaksanaannya yang mungkin mengalami perubahan pada termin

²⁹ KIARA, “Evaluasi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 KIARA: Lima Tahun Poros Maritim Dunia, Perampasan Ruang Hidup Terus Terjadi”, 4 Februari 2020, <http://www.kiara.or.id/2020/02/04/evaluasi-tahun-2019-dan-proyeksi-tahun-2020-kiara-lima-tahun-poros-maritim-dunia-perampasan-ruang-hidup-terus-terjadi/>, diakses pada 19 April 2020.

³⁰ M. Riza Damanik, “Menakar Kelanjutan Visi Maritim Jokowi”, 2 Februari 2019, <https://katadata.co.id/opini/2019/02/02/menakar-kelanjutan-visi-maritim-jokowi>, diakses pada 19 April 2020.

³¹ Deti Mega Purnamasari, “Apa Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?” 7 Agustus 2019, <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/07/08062741/apa-kabar-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia?page=2>, diakses pada 19 April 2020.

kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, visi maritim Indonesia tetap signifikan untuk diperjuangkan mengingat dinamika global yang terus mengindikasikan pentingnya wilayah maritim dalam pertarungan kepentingan negara-negara besar. Dalam hal ini, perkembangan narasi Indo-Pasifik menjadi salah satu kata kunci yang penting untuk didiskusikan lebih jauh.

Indo-Pasifik: Ekspansi Regional Visi Poros Maritim Dunia

Dalam pengertiannya, Indo-Pasifik merupakan sebuah tatanan regional baru yang mencakup negara-negara di kawasan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Akan tetapi, setiap negara memiliki cara pandang berbeda dalam mengartikan dan memosisikan diri dalam narasi besar Indo-Pasifik ini.

Salah satu negara yang mengawali naiknya konsep Indo-Pasifik di kancah internasional adalah Jepang. Dalam kunjungannya ke India pada tahun 2007, Perdana Menteri Shinzo Abe memberikan pidato berjudul “Confluence of Two Seas”. Dalam pidato tersebut ia mengatakan,

*“Now, as this new “broader Asia” takes shape at the confluence of the two seas of the Indian and Pacific Oceans, I feel that it is imperative that the democratic nations located at opposite edges of these seas deepen the friendship among their citizens at every possible level.”*³²

Pemaknaan “broader Asia” dapat ditemukan pada pemaparan Jepang dalam memandang Indo-Pasifik melalui skema *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP) yang mana cakupan kepentingan Jepang mengalami perluasan. Pada skema tersebut dikatakan bahwa “kunci dari stabilitas dan kemakmuran komunitas internasional adalah dinamisme yang diciptakan dari penggabungan dua benua (Asia dan Afrika) serta dua samudra (Pasifik

³² Ministry of Foreign Affairs of Japan, “‘Confluence of the Two Seas’ Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India”, 22 Agustus 2007 <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>, diakses pada 20 April 2020.

dan Hindia)”.³³

Perluasan cakupan kepentingan ini juga termaktub dalam perspektif Indo-Pasifik yang dikeluarkan Australia. Dalam *Australian Defence White Paper* tahun 2013 tertulis,

*“The 2009 Defence White Paper made clear Australia’s enduring interest in the stability of what it called the wider Asia-Pacific region. The Indo-Pacific is a logical extension of this concept, and adjusts Australia’s priority strategic focus to the arc extending from India though Southeast Asia to Northeast Asia, including the sea lines of communication on which the region depends.”*³⁴

Dilihat dari frase “extension” yang digunakan, terdapat kesamaan antara konsep PM Abe dan *White Paper* Australia. Namun, Australia memberikan cakupan region yang berbeda secara spesifik, yaitu India yang berlanjut ke Asia Tenggara, lalu ke Asia Timur Laut. Cakupan wilayah ini juga kembali ditekankan pada dokumen resmi berikutnya yang lebih dalam membahas kepentingan Australia atas wilayah Indo-Pasifik. Dalam *Foreign Policy White Paper* tahun 2017, Indo-Pasifik didefinisikan sebagai “region yang mencakup wilayah timur Samudra Hindia ke arah Samudra Pasifik yang dikoneksikan oleh Asia Tenggara, termasuk pula India, Asia Utara dan Amerika Serikat.”³⁵

Dari pemaparan Jepang dan Australia, dapat terlihat ketertarikan yang jelas pada peningkatan hubungan dengan India sebagai salah satu negara terkuat pada kawasan Samudra Hindia. Bagi India sendiri, perluasan kebijakan luar negerinya sudah dilakukan melalui *Look East Policy* dan dilanjutkan dengan *Act East*

policy. *Look East Policy* menitikberatkan pada penguatan hubungan ekonomi, institusi, dan keamanan antara India dan negara-negara tetangga yang berada di wilayah sebelah timur dari India, termasuk Asia Tenggara, Asia Timur Laut, dan Australia.³⁶ Sementara itu, *Act East policy* adalah usaha India mentransformasi kebijakan untuk mengoptimalkan hubungan dengan negara-negara tersebut.³⁷

Seiring dengan naiknya konsep Indo-Pasifik, pada tahun 2019 India pun akhirnya mengambil sikap yang tertuang dalam Pidato Perdana Menteri Narendra Modi pada *Shangri-la Dialogue* tahun 2018. PM Modi mengatakan:

*“India does not see the Indo-Pacific Region as a strategy or as a club of limited members. Nor as a grouping that seeks to dominate. And by no means do we consider it as directed against any country. A geographical definition, as such, cannot be.”*³⁸

PM Modi menjelaskan bahwa perspektif India mengenai Indo-Pasifik terdiri atas tujuh elemen, yaitu (1) sebagai kawasan yang bebas, terbuka, dan inklusif, (2) Asia Tenggara sebagai pusat dari kawasan ini, (3) kesejahteraan dan keamanan bersama membutuhkan perubahan melalui dialog, (4) adanya kesempatan yang sama untuk mengakses kawasan maritim sesuai ketentuan hukum internasional, (5) adanya keuntungan dari globalisasi, (6) konektivitas yang merata, dan (7) hubungan antarkekuatan yang berdasarkan kerja sama.³⁹

Selanjutnya, dalam memahami Indo-Pasifik, penting melihat posisi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok sebagai dua kekuatan besar yang saling memperebutkan hegemoninya di

³³ Ministry of Foreign Affairs of Japan, “Free and Open Indo-Pacific”, (tidak ada tanggal) <https://www.mofa.go.jp/files/000430632.pdf>, diakses pada 20 April 2020.

³⁴ Department of Defence Australian Government, “Defence White Paper 2013”, hlm. 7, (tidak ada tanggal), https://www.defence.gov.au/Whitepaper/2013/docs/WP_2013_web.pdf, diakses pada 20 April 2020.

³⁵ Department of Foreign Affairs and Trade Australia, “2017 Foreign Policy White Paper”, hlm 1, (tidak ada tanggal), <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>, diakses pada 20 April 2020.

³⁶ Danielle Rajendram, “India’s New Asia-Pacific Strategy: Mody Act East,” Lowy Institute for International Policy Analysis (December 2014): 1–20, hlm. 2.

³⁷ Danielle Rajendram, “India’s New Asia-Pacific..”, hlm. 15.

³⁸ Ministry of External Affairs Government of India, “Prime Minister’s Keynote Address and Shangri La Dialogue (June 01, 2018)”, 1 Juni 2018, <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018>, diakses pada 20 April 2020.

³⁹ Ministry of External Affairs Government of India, “Prime Minister’s Keynote Address..”,

wilayah ini. Meningkatnya kekuatan Tiongkok dalam ranah ekonomi dan strategis telah menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi AS, terlebih ketika Tiongkok memulai proyek *Belt and Road Initiative* (BRI). Hal ini diindikasikan sebagai keinginan Tiongkok untuk membentuk jaringan hegemoninya melalui pembangunan infrastruktur. Maka, konsep Indo-Pasifik bagi AS kental dengan maksud untuk mengimbangi, apabila tidak membendung, kekuatan Tiongkok di kawasan. Dalam *National Security Strategy* 2017 yang dikeluarkan AS, terlihat jelas sudut pandang AS terhadap Tiongkok dalam konteks Indo-Pasifik. Dalam dokumen itu tertulis, “kompetisi geopolitik antara visi yang mengedepankan kebebasan dan visi yang represif sedang berlangsung di kawasan Indo-Pasifik”.⁴⁰ Dengan kalimat demikian, AS sedang melakukan formulasi atas dua kekuatan yang ada di kawasan ini sehingga akan terdapat dua kubu yang berseberangan.

Di lain pihak, Tiongkok tidak banyak membicarakan kebijakan luar negerinya dalam konteks Indo-Pasifik. Bahkan dalam pengamatan Feng Liu, Tiongkok menunjukkan keengganan untuk menggunakan termin Indo-Pasifik dan para juru bicara Tiongkok cenderung menggunakan “Asia-Pasifik” ketika merespons pertanyaan mengenai Indo-Pasifik.⁴¹ Hal ini terlihat jelas dalam respons diplomatis Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, saat ditanya mengenai konsep Indo-Pasifik, khususnya yang dikeluarkan oleh ASEAN. Menlu Wang Yi memfokuskan jawabannya pada pembentukan kerja sama regional yang telah banyak dilakukan. Menurutnya, Tiongkok sebagai bagian penting dari kerja sama regional tersebut memiliki sikap yang akan selalu terbuka dan konstruktif.⁴²

⁴⁰ White House, “National Security Strategy of the United States of America”, hlm. 45, Desember 2017, <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>, diakses pada 20 April 2020.

⁴¹ Feng Liu, “The Recalibration of Chinese Assertiveness: China’s Response to the Indo-Pacific Challenge,” *International Affairs* 96, no. 1 (2020): hlm. 15–16.

⁴² Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China, “Wang Yi Talks about Indo-Pacific Concept”, 31 Juli 2019, https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1685652.shtml, diakses pada 20 April 2020.

Terlepas dari perbedaan sikap AS dan Tiongkok serta bagaimana negara-negara yang berkepentingan memandang Indo-Pasifik, terdapat pesan yang jelas bahwa perluasan wilayah kepentingan yang terjadi saat ini berbasis pada nilai geostrategis dan geoekonomi kedua samudra. Oleh karena itu, penguasaan atas kedua samudra itu menjadi suatu hal yang penting. Hal ini mendorong semangat Indonesia untuk terus memperjuangkan visi Poros Maritim Dunia. Visi ini tidak dibicarakan sebatas pada proyek dan program berkenaan dengan maritim, namun semangat untuk mengedepankan perspektif maritim dalam lingkup regional. Dalam visi Poros Maritim Dunia, pilar diplomasi maritim telah menyebutkan keinginan Indonesia untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo pernah mengatakan,

“...kami mengajak semua mitra-mitra Indonesia untuk bekerja sama di bidang kelautan ini. Bersama-sama kita harus menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut. Laut harus menyatukan, bukan memisahkan, kita semua.”⁴³

Dinamika yang memanas pada diskursus Indo-Pasifik mendorong Indonesia mengimplementasikan visi Poros Maritim Dunia-nya dalam ranah diplomasi dengan mengajukan draft *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) pada April 2018. Dalam paparan Dewi Fortuna Anwar disebutkan bahwa draf ini sempat diragukan oleh negara-negara ASEAN lainnya, setelah diskusi mendalam termasuk pada sebuah pertemuan tingkat tinggi yang diikuti menlu, wakil menlu, dan pejabat tinggi dari 18 anggota KTT Asia Timur. Draf ini kemudian akhirnya diterima dengan sedikit perubahan pada KTT ASEAN bulan Juni 2019.⁴⁴ AOIP berisikan komitmen untuk menjaga Indo-Pasifik sebagai kawasan yang terintegrasi dan terkoneksi, mengedepankan dialog dan kerja sama, memajukan pembangunan

⁴³ Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, “Pidato Presiden RI Joko Widodo pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014”.

⁴⁴ Dewi Fortuna Anwar, “Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” *International Affairs* 96, no.1 (2020): hlm. 126–127.

dan kesejahteraan serta menggarisbawahi pentingnya wilayah dan perspektif maritim dalam arsitektur regional yang selalu berubah.⁴⁵

Penutup

Dari apa yang sudah dipaparkan, visi Poros Maritim Dunia jelas menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya. Namun, usaha Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali ambisi Indonesia untuk menjadi bangsa yang tidak lagi memunggungi laut, patut diapresiasi. Setelah sekian lama agenda maritim tidak diartikulasikan secara jelas sebagai visi pembangunan nasional, Presiden Joko Widodo pada termin pertamanya berhasil menorehkan jejak dalam menghidupkan kembali kesadaran akan pentingnya sektor maritim.

Sayangnya, keberlangsungan program dan implementasi visi Poros Maritim Dunia harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan pada termin kedua pemerintahan Joko Widodo di mana gaung dari visi ini tidak sekeras periode sebelumnya. Akan tetapi, hadirnya AOIP atas inisiatif Indonesia merupakan pembuktian bahwa kesadaran mengenai pentingnya wilayah maritim belum pudar dan justru diekspansi pada lingkup regional yang lebih luas. Bahkan dalam usahanya kini, Indonesia mampu menempatkan diri sebagai pionir yang meyakinkan negara-negara Asia Tenggara akan pentingnya isu ini. Tentunya dalam waktu ke depan perlu dilakukan usaha yang lebih optimal untuk tetap menjaga semangat dari visi Poros Maritim Dunia agar apa yang telah dibangun tidak menjadi sia-sia. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya evaluasi dan koordinasi lebih jauh oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi yang berpegang pada Kebijakan Kelautan Indonesia yang telah dikeluarkan.

⁴⁵ ASEAN, “Asean Outlook on the Indo-Pacific”, (tidak ada tanggal), https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf, diakses pada 20 April 2020.

Daftar Pustaka

- Anwar, Dewi Fortuna. “Indonesia and the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.” *International Affairs* 96, no.1 (2020):111–129.ASEAN. “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.” (tidak ada tanggal). https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf, diakses pada 20 April 2020.
- ASEAN. “ASEAN Regional Forum Statement on Cooperation to Prevent, Deter, Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing.” (tidak ada tanggal). <http://aseanregionalforum.asean.org/wp-content/uploads/2019/01/ARF-Statement-on-Cooperation-to-Prevent-Deter-and-Eliminate-Illegal-Unreported-and-Unregulated-Fishing-Manila-the-Philippines-7-August-2017.pdf>, diakses pada 17 April 2020.
- ASEAN. “EAS Statement on Enhancing Regional Maritime Cooperation, Kuala Lumpur 2015”. 22 November 2015. <https://www.asean.org/storage/images/2015/November/10th-EAS-Outcome/EAS%20Statement%20on%20Enhancing%20Regional%20Maritime%20Cooperation%20-%20FINAL%2022%20November%202015.pdf>, diakses pada 17 April 2020.
- BBC. “Pidato Kemenangan Jokowi di Sunda Kelapa”. 22 Juli 2014. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/07/140722_presiden_jokowi, diakses pada 10 April 2010.
- Berty, Teddy Tri Setio. “Indonesia Pimpin Penguatan Kerja Sama Maritim di Kawasan ASEAN”. 6 Desember 2017. <https://www.liputan6.com/global/read/3185957/indonesia-pimpin-penguatan-kerja-sama-maritim-di-kawasan-asean>, diakses pada 17 April 2020.
- Chaniago, Risha Jilian. “Ancaman Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing di Perairan Indonesia.” *Majalah Masyarakat ASEAN* (Desember 2016). Damanik, M. Riza. “Menakar Kelanjutan Visi Maritim Jokowi”. 2 Februari 2019. <https://katadata.co.id/opini/2019/02/02/menakar-kelanjutan-visi-maritim-jokowi>, diakses pada 19 April 2020.
- Department of Defence Australian Government, “Defence White Paper 2013”. (tidak ada

- tanggal). https://www.defence.gov.au/Whitepaper/2013/docs/WP_2013_web.pdf, diakses pada 20 April 2020.
- Department of Foreign Affairs and Trade Australia. “2017 Foreign Policy White Paper”. (tidak ada tanggal). <https://www.dfat.gov.au/sites/default/files/2017-foreign-policy-white-paper.pdf>, diakses pada 20 April 2020.
- F. Muhibat, Shafiah. “AMF and EAMF: An Uncertain Future?”. 2 Juni 2017 <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2017/06/CO17111.pdf>, diakses pada 17 April 2020.
- Hamdani, Trio. “Lamat Tak terdengar, Apa Kabar Program Tol Laut Jokowi”. 12 Maret 2020. <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-4936600/lama-tak-terdengar-apa-kabar-program-tol-laut-jokowi>, diakses pada 15 April 2020.
- Idris, Muhammad. “Selama Jadi Menteri, Berapa Kapal yang ditenggelamkan Susi?”. 6 Januari 2020. <https://money.kompas.com/read/2020/01/06/160600226/selama-jadi-menteri-berapa-kapal-china-ditenggelamkan-susi>, diakses pada 15 April 2020.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. “Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)”. (tidak ada tanggal). https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2016/10/PERPRES_NO_115_2015.pdf, diakses pada 15 April 2020.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. “Pembangunan Tol Laut Libatkan 24 Pelabuhan”. 25 Mei 2015. <http://dephub.go.id/berita/baca/pembangunan-tol-laut-libatkan-24-pelabuhan/?cat=QmVyaXRhA==>, diakses pada 15 April 2020.
- Kementerian PPN/Bappenas. “Menteri Bambang: Mewujudkan Terciptanya Konektivitas Timur Barat Indonesia melalui Tol Laut”. 4 Mei 2017. <https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/menteri-bambang-mewujudkan-terciptanya-konektivitas-timur-barat-indonesia-melalui-tol-laut/>, diakses pada 15 April 2020.
- Khanisa dan Faudzan Farhana (eds.). *Keamanan Maritim ASEAN dalam Perspektif Ekonomi Politik Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2018.
- KIARA. “Evaluasi Tahun 2019 dan Proyeksi Tahun 2020 KIARA: Lima Tahun Poros Maritim Dunia, Perampasan Ruang Hidup Terus Terjadi”. 4 Februari 2020. <http://www.kiara.or.id/2020/02/04/evaluasi-tahun-2019-dan-proyeksi-tahun-2020-kiara-lima-tahun-poros-maritim-dunia-perampasan-ruang-hidup-terus-terjadi/>, diakses pada 19 April 2020.
- KPU. “Visi-Misi-Program Aksi Ir. H. Joko Widodo-Drs. H.M. Jusuf Kalla Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014”. (tidak ada tanggal). https://www.kpu.go.id/koleksigambar/Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf, diakses pada 10 April 2020.
- Laporan Penelitian Tim Kajian ASEAN 2019. “Poros Maritim Dunia dan Konektivitas Maritim di ASEAN”. (belum dipublikasikan).
- Liu, Feng. “The Recalibration of Chinese Assertiveness: China’s Response to the Indo-Pacific Challenge.” *International Affairs* 96, no. 1 (2020): 9–27.
- Manalu, Juli Etha Ramaida. “Pelaku Perikanan Asia Tenggara Berkumpul, Keberlanjutan Jadi Fokus.” 20 Maret 2019. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190320/99/902196/pelaku-perikanan-asia-tenggara-berkumpul-keberlanjutan-jadi-fokus>, diakses pada 17 April 2020.
- Ministry of External Affairs Government of India. “Prime Minister’s Keynote Address and Shangri La Dialogue (June 01, 2018)”. 1 Juni 2018. <https://www.mea.gov.in/Speeches-Statements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018>, diakses pada 20 April 2020.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. “‘Confluence of the Two Seas’ Speech by H.E.Mr. Shinzo Abe, Prime Minister of Japan at the Parliament of the Republic of India”. 22 Agustus 2007. <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html>, diakses pada 20 April 2020.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Free and Open Indo-Pacific”, (tidak ada tanggal) <https://www.mofa.go.jp/files/000430632.pdf>, diakses pada 20 April 2020.
- Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. “Wang Yi Talks about Indo-Pacific Concept”. 31 Juli 2019. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1685652.shtml, diakses

- pada 20 April 2020.
- Negara, Siwage Dharma, dan Sanchita Basu Das. "Challenges for Indonesia to achieve its Maritime Connectivity Plan and Leverage on Regional Initiatives." *ISEAS Yusof Ishak Institute Perspective 2017*, no. 3, (10 Januari 2017): 1–11.
- Nick, Bisley. "The East Asia Summit and ASEAN: Potential and Problems." *Contemporary Southeast Asia* 39, no. 2 (Agustus 2017): 265–272.
- Purnamasari, Deti Mega. "Apa Kabar Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?". 7 Agustus 2019. <https://nasional.kompas.com/read/2019/08/07/08062741/apa-kabar-indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia?page=2>, diakses pada 19 April 2020.
- Rajendram, Danielle. "India's New Asia-Pacific Strategy: Mody Act East." *Lowy Institute for International Policy Analysis* (December 2014): 1–20.
- Republika, "Ini Isu Pidato Kenegaraan Pertama Presiden Joko Widodo", 20 Oktober 2014, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/20/ndqafl-ini-isi-pidato-kenegaraan-pertama-presiden-joko-widodo>, diakses pada 10 April 2020.
- Rochwulaningsih, Yety. "Jokowi Perlu Strategi Baru untuk Mencapai Ambisi Poros Maritim Dunia. Ini Caranya". 8 November 2019. <https://theconversation.com/jokowi-perlu-strategi-baru-untuk-mencapai-ambisi-poros-maritim-dunia-ini-caranya-126432>, diakses pada 19 April 2020.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia". (tidak ada tanggal). <https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175145/lampiran%201%20perpres%2016%20th%202017.pdf>, diakses pada 1 April 2020.
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman". (tidak ada tanggal). <https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/174381/Perpres%20Nomor%2010%20Tahun%202015.pdf>, diakses pada 13 April 2020.
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. "Pidato Presiden RI Joko Widodo Pada KTT ke-9 Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014". 14 November 2014. <https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>, diakses pada 10 April 2020.
- Shekar, Vibhanshu dan Joseph Liow. "Indonesia as Maritime Power: Jokowi's Vision, Strategies, and Obstacle Ahead". 7 November 2014. <https://www.brookings.edu/articles/indonesia-as-a-maritime-power-jokowis-vision-strategies-and-obstacles-ahead/>, diakses pada 13 April 2020.
- White House. "National Security Strategy of the United States of America". December 2017. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf>, diakses pada 20 April 2020.
- Witular, Rendi A. "Jokowi Launches Maritime Doctrine to the World". 13 November 2014. <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-launches-maritime-doctrine-world.html>, diakses pada 12 April 2020.
- Xinli, Qiu. "Why BRI-GMF Cooperation Benefits China and Indonesia". *The Jakarta Post*. 23 Agustus 2013.

TENTANG PENULIS

M. Bahtiar Fajri

Penulis merupakan alumnus Universitas Pertahanan yang saat ini sedang bekerja sebagai pengajar di Yayasan Darul Fikri Sidoarjo. Penulis dapat dihubungi melalui: 10020084024. fajri@gmail.com

Alfin Febrian Basundoro

Penulis merupakan mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Tertarik dengan Studi Politik dan Keamanan Global sebagai fokus studinya, saat ini, penulis aktif dalam sejumlah organisasi mahasiswa berbasis *think-tank*, di antaranya Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) *chapter* Universitas Gadjah Mada dan Unit Penalaran Ilmiah Interdisipliner (UPII) Universitas Gadjah Mada. Penulis dapat dihubungi melalui surel: alfinfb@gmail.com.

Petrus Kanisius Siga Tage

Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ners Universitas Citra Bangsa Kupang. Saat ini aktif mengajar mata kuliah Manajemen Keperawatan, Filsafat Keperawatan, dan Metodologi Penelitian Kualitatif Keperawatan. Penulis dapat dihubungi melalui email: petruskanisiusigatage@ucb.ac.id

M. Hamdan Basyar

Penulis merupakan Peneliti Ahli Utama pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Kajian utamanya adalah Agama dan Politik, Dunia Islam, dan Masalah Timur Tengah. Dia juga Dosen Pasca Sarjana Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia (2002-sekarang).

Dia pernah meneliti berbagai masalah sosial, budaya, dan politik di berbagai tempat di Indonesia, hampir semua wilayah: dari Aceh sampai Papua.

Selain itu, dia juga pernah meneliti/seminar di luar negeri, yaitu: di Yordania (1995), Mesir (1995), Turki (1996), Belanda (1996), Inggris (1996), Singapore (2004), Malaysia (2004, 2014), Australia (2005), Iran (2008), Lebanon (2016), Arab Saudi (2017), Tunisia (2018), dan Qatar (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: hbasyar@gmail.com

Putri Ariza Kristimanta

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI). Meraih gelar S1 dari Universitas Indonesia dan S2 dari Universitas Pertahanan. Bergabung sebagai peneliti dalam Tim Reformasi Sektor Keamanan LIPI sejak 2018. Secara luas, memiliki minat kajian seputar studi perdamaian dan konflik. Penulis dapat dihubungi melalui email: putr018@lipi.go.id

Khanisa

Peneliti Muda pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Memegang gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 dari Australian National University. Tergabung dalam Tim Kajian ASEAN P2P LIPI sejak 2011. Khanisa memiliki ketertarikan pada kajian Politik Internasional, Regionalisme dan Asia Tenggara. Penulis dapat dihubungi melalui email: khanisa.krisman@gmail.com

Lidya Christin Sinaga

Peneliti Madya pada Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Meraih gelar S1 dari Universitas Gadjah Mada dan S2 dari Flinders University, Australia. Tergabung dalam Tim Kajian ASEAN P2P LIPI sejak 2008 dan Tim Kajian Etnik Tionghoa sejak 2018. Lidya memiliki ketertarikan pada kajian ASEAN, Hubungan Indonesia-Tiongkok, dan Etnik Tionghoa di Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: lidya.bosua@gmail.com

Indriana Kartini

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik LIPI sejak 2003 hingga saat ini. Ia menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Padjajaran pada tahun 2002. Gelar Master of International Politics diraih dari the University of Melbourne, Australia pada tahun 2008. Selain aktif tergabung dalam Tim Penelitian Perbatasan P2 Politik LIPI, penulis saat ini juga sedang menempuh Pendidikan S3 di Universitas Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: indriana.kartini@gmail.com

Defbry Margiansyah

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan sarjana dari program studi Hubungan Internasional di Universitas Pasundan dan magister dari Global Studies Programme di Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Minat kajian difokuskan pada tema dan isu seputar ekonomi politik global, teknologi, demokrasi, dan sosiologi politik internasional. Penulis dapat dihubungi melalui email: defbry@yahoo.com / defbry@gmail.com

